Subjek-subjek yang tidak akan membiarkan dirinya dibakukan oleh segala jenis transedensi - adalah subjek-subjek yang berbicara untuk dirinya sendiri, tanpa representasi. Subjek-subjek yang sedang dan akan mendeterminasikan sejarahnya melalui pengalaman-pengalaman yang dihidupinya.

Kita berbicara tentang multitude sebagai suatu kekuatan dan potensi. Sebagai kecenderungan dan tendensi, krisis dan transformasi. Multitude adalah ragambentuk yang mengekspresikan kekuatannya tidak hanya sebagai suatu keutuhan, tapi juga sebagai kesatuan-kesatuan otonom yang utuh dalam dirinya sendiri.

Ketika dalam setiap periode perkembangan manusia, bentuk-bentuk bermetamorfosa melalui ragam perjuangan,gerak dan hasrat untuk bertransformsi - Multitude adalah potensi murni,kekuatan kehidupan yang tidak dapat dibakukan - yang terus menerus mentransformasikan dirinya menuju kehidupan utuh. Monster revolusioner yang muncul di akhir modernisme terus menerus menginginkan transformasi ke bentuk-bentuk kehidupan baru.

Multitude

PERDAGANGAN BEBAS
ADALAH SUATU KONTRADIKSI

Oposisi dari perdagangan bebas bukanlah perdagangan budak. Oposisi dari perdagangan bebas adalah kebebasan itu sendiri. Perdagangan telah memperbudak: seperti kita ketahui ekonomi telah mendikte kehidupan, menghancurkan hutan untuk dijadikan mal dan lahan parkir, mereduksi keindahan yang kompleks menjadi komoditas untuk dijual dan dibeli.

Perdagagan adalah sesuatu yang tidak membebaskan - saat ini perdagangan adalah suatu cara bagi orang yang kaya untuk menjadi lebih kaya di atas penderitaan orang lain. Segelintir orang akan dilahirkan di lingkungan superkaya, sebagian (besar) dalam kesengsaraan - dan jelas mereka dari kelompok pertama telah mendahului permainan. Tidaklah mengherankan bahwa untuk setiap Bill Gate diperlukan puluhan bahkan ratusan ribu orang yang hidup dalam kesengsaraan. Kucing-kucing gemuk itu tidak akan berhenti sampai di tahap ini, mereka akan menghancurkan segala jenis hambatan antara mereka dan profit maksimum.

Sebagian dari kita percaya bahwa manusialah yang memerlukan kebebasan, bukan perdagangan. Dalam protes kita menentang apa yang dikatakan sebagai perdagangan bebas, dalam usaha kita untuk melakukan hal-hal berdasarkan nurani kita dan bukan untuk uang, kita menemukan kembali apa itu kebebasan sebenarnya. Jangan memperdagangkan kebebasanmu, bergabunglah dengan kami.
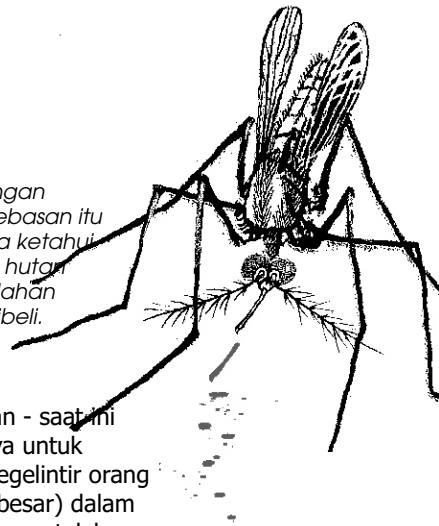
Moderasi&Mediasi
AFFINITAS
affinitas@riseup.net

MULTITUDE

Globalisasi adalah kebebasan bagi korporasi, pembantaian bagi yang bukan

Globalisasi adalah terminologi yang digunakan oleh para ahli ekonomi, media dan para politisi untuk mendeskripsikan proses memperkuat "Ekonomi Global" yang juga dikenal sebagai "Pasar Bebas" atau "Neo-Liberalisme". Globalisasi dimotori oleh beberapa institusi-institusi ekonomi global seperti World Trade Organization (WTO), World Bank (Bank Dunia) dan International Monetary Fund (IMF).

Globalisasi oleh badan-badan tersebut dideskripsikan kepada publik sebagai sebuah pemicu yang akan menaikkan taraf perekonomian semua negara di dunia—saat korporasi-korporasi mendapat profit yang besar, maka hal tersebut dianggap akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitarnya. Tapi masalahnya, dalam prakteknya, korporasi-korporasi tersebut di seluruh belahan dunia harus mencari tempat dimana sumber daya alam dan upah buruhnya adalah yang paling murah; yang mana seringkali hal tersebut berarti juga relokasi industri-industri lokal di negara-negara Dunia Ketiga.

Dibentuk di tahun 1944, World Bank dan IMF memfasilitasi Ekonomi Global dengan memberi pinjaman kepada negara-negara Dunia Ketiga sejumlah besar dana dalam mata uang asing. Biasanya pinjaman tersebut membawa banyak kepentingan lain di belakangnya. Kepentingan-kepentingan tersebut menguntungkan korporasi-korporasi multinasional dalam memapankan jalannya memasuki negara-negara Dunia Ketiga dan membuka proyek-proyeknya yang biasanya selalu merusak lingkungan (seperti industri perhutanan, pertambangan, pembangunan dam, dll) serta mengeksploitasi penduduk daerah tersebut sebagai para pekerjanya.

World Bank dan IMF juga bertanggung jawab dalam mengumpulkan dana-dana hutang negara-negara Dunia Ketiga. Dikarenakan hutang yang dimiliki oleh negara-negara tersebut semakin lama semakin membengkak dan kemungkinan untuk dapat dibayarnya semakin kecil, biasanya negara-negara Dunia Ketiga tersebut tak mampu membayarnya dan harus mencari pinjaman lain untuk melunasi hutang yang telah ada tersebut. Lingkarang jerat hutang tersebutlah yang sebenarnya menjauhkan negara-negara Dunia Ketiga dari "kemapanan" karena demi membayar hutang-hutang negara maka dana yang harus dikeluarkan bagi kepentingan penduduk harus dikurangi bahkan dihapuskan. Karena hal ini juga maka negara-negara Dunia Ketiga terpaksa harus mengikuti syarat yang diberikan oleh negara-negara donor untuk memperbolehkan korporasi-korporasi multinasional masuk ke negara tersebut dan dengan bebas beroperasi disana termasuk dalam menentukan upah para pekerjanya dan harga sumber daya alam yang hendak dibelinya.

Sementara WTO, yang semakin mapan, adalah badan institusi internasional yang berhak um

"To allow the market mechanism to be sole director of the fate of human beings and their natural environment...would result in the demolition of society".

- Karl Polanyi

menentukan apa yang akan terjadi pada satu negara saat negara tersebut akan menjalin hubungan dagang dengan negara lainnya. Inilah yang disebut dengan WTO Tribunal. Agenda WTO adalah meningkatkan terjadinya perdagangan global—yang berarti juga mengurangi hukum-hukum dagang tiap negara atau apapun juga yang dianggap menghalangi terjadinya hubungan dagang. Hambatan dagang ini seperti yang dideskripsikan oleh tiga anggota Tribunal, dapat diinterpretasikan antara lain hukum kesehatan makanan yang diproduksi, hukum lingkungan yang melindungi spesies-spesies yang hampir punah, dan juga hukum yang melindungi HAM. Semua hukum tersebut harus dihapuskan saat dianggap menghalangi terjadinya proses dagang. Pendeknya, WTO memiliki otoritas sendiri yang lebh kuat dari otoritas negara manapun dalam menentukan hukum dan undang-undang yang berlaku di sebuah negara.

Secara esensialnya, WTO dan sistem Ekonomi Global Baru atau sering disebut sebagai Neo-Liberalisme (liberal = kebebasan tanpa batasan termasuk kebebasan untuk menindas dan mengeksploitasi), hanya akan berdampak sangat besar pada penghancuran lingkungan hidup, pengeksploitasian tenaga kerja dan melecehkan hak-hak asasi manusia. Satu-satunya yang menjadi prioritas bagi globalisasi hanyalah kepentingan bisnis bagi mereka, korporasi multinasional yang memiliki profit terbesar yang barang tentu korporasi yang paling kaya. Secara singkatnya, Globalisasi atau pasar bebas adalah juga berarti kebebasan bagi ekonomi itu sendiri—inilah imperialisme gaya baru, inilah Neo-Liberalisme.

Apakah Globalisasi tanda berakhirnya... peran NEGARA?
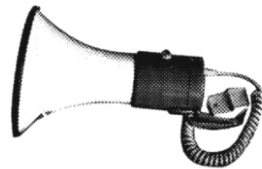
Tidak. Saat memang betul bahwa ukuran perusahaan korporasi multinasional telah membesar seiring dengan mobilitas modal, kebutuhan akan peran negara demi kepentingan korporasi masih diperlukan. Untuk meningkatkan mobilitas modal, dengan kata lain harus ada kemudahan bagi modal untuk bergerak dari satu negara dan menanam investasi di negara lain—makanya dinamakan pasar bebas. Korporasi harus dapat memastikan bahwa tiap pemerintah negara akan melakukan apa yang mereka katakan dan hal ini hanya dapat dilakukan dengan memberikan ancaman-ancaman ekonomi.

Globalisasi ini akan semakin mudah dimengerti apabila kita mengerti sejarahnya terlebih dahulu. Proses awal munculnya perdagangan internasional, investasi asing dan pasar finansial adalah sekitar akhir tahun 60an dan awal tahun 70an. Kompetisi yang meningkat atas berkembangnya Eropa Barat dan Jepang telah membuat dominasi Amerika tertantang, dikombinasikan dengan gerakan resistansi di berbagai negara yang semakin kuat, membuat para pemodal merasa terancam. Belum lagi krisis hutang yang melanda dunia di tahun 80an, semakin mempromosikan Globalisasi.

Di banyak negara, hutang telah memposisikan peran sentral bagi negara-negara donor dalam menentukan kebijakan ekonomi negara tersebut. Krisis hutang ini juga yang dapat secara efektif memaksakan sistem Neo-Liberalisme pada negara-negara penghutang. Hal ini terjadi saat negara-negara Dunia Ketiga mulai tidak mampu membayar hutang-hutang mereka—tapi bagaimanapun juga, hutang tetap harus dibayar. Dan bukannya memaksa tiap negara untuk membayar dengan mengirimkan kekuatan militer, negara-negara donor memilih untuk mengirimkan IMF dan Bank Dunia—dua badan internasional pengucur dana pinjaman. Kebutuhan akan suntikan dana baru demi memenuhi pembayaran hutang-hutangnya, membuat negara-negara yang "sedang berkembang" tersebut tidak memiliki alternatif selain menyetujui program reformasi ekonomi yang didesain oleh IMF. Bila mereka menolak, maka hutang tak akan diberikan, simpel.

Capitalism only triumphs when it becomes indentified with the state, when it is the state.

-Fernand Braudel

"Setiap usaha untuk melakukan isolasi ataupun separasi hanya akan menyebabkan dominasi yang lebih brutal oleh sistem global, reduksi yang mengarah pada ketidakberdayaan dan kemiskinan".

Michael hardt & Antonio Negri.

Program reformasi ekonomi tersebut adalah pemotongan dana negara yang selama ini digunakan untuk keperluan publik karena dianggap tidak menghasilkan profit, menekan jumlah upah pekerja serendah mungkin, membuka pintu bagi korporasi multinasional untuk membeli bahan baku dengan harga murah dan menghapuskan hukum serta undang-undang yang dianggap menghalangi mengalirnya modal asing ke dalam dan ke luar negeri. (Lihat box "Apakah Globalisasi Itu?").

Lebih jauhnya lagi, hal tersebut berarti bahwa pasar global membutuhkan organisasi yang mengglobal (begitu juga sebaliknya). Dengan beroperasi dalam level global, korporasi-korporasi dapat menanamkan investasi di berbagai negara yang dapat menjamin bisnisnya dengan mempertahankan eksploitasinya terhadap pekerja dan alamnya.

Dengan kebutuhan akan kucuran dana hutang baru, maka tiap negara penghutang akan berkompetisi dengan sesamanya untuk berebut saling memberikan tawaran terbaik bagi para investor dan korporasi transnasional antara lain dengan menawarkan potongan pajak, memperketat undang-undang anti serikat pekerja, penghapusan kontrol atas polusi, dsb. Maka tampak jelas alasan bagi korporasi untuk memilih beberapa negara yang paling bagus dalam membuka kebebasan baginya. Dalam level lokal, modal akan mengalir ke negara-negara dimana pemerintahnya mampu mengatur semua tuntutan IMF tersebut.

Maka, dalam tuduhan bahwa peran negara akan melemah dalam era globalisasi, kita tidak boleh melupakan bahwa justru peran negara semakin menguat di satu sisi—dalam represifitasnya melawan penduduknya sendiri. Tanpa upah pekerja yang harus tetap rendah, maka kucuran dana hutang akan dibatalkan. Tanpa mampu membungkam gerakan protes para pekerja atau kaum environmentalis, maka modal tak akan mengalir.

Tapi sebagai akhir artikel ini, perlu ditekankan lagi, bahwa adalah sebuah kesalah pahaman saat melihat pertentangan antara perlunya penguatan negara dan kepentingan pasar dunia (seperti penyakit yang sering diderita oleh para aktivis lokal). Globalisasi adalah inisiatif berdasar pada negara dengan tujuan utamanya adalah membuat dominasi ekonomi agar tetap mapan. Pasar global membutuhkan politisi lokal untuk beraksi sebaik mungkin sesuai kepentingan mereka. Dengan mendukung kepentingan korporasi-korporasi tersebut, para elit politik dapat memantapkan kekuasaan mereka dan membantu membentuk "New World Order" sesuai dengan image yang mereka bentuk. Jadi tampaknya, usulan solusi bahwa untuk melawan globalisasi adalah dengan jalan memperkuat posisi negara adalah solusi yang tidak masuk akal.